

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur dan penataan ruang kota di kota Palembang. Sejarah singkat Dinas PUPR Kota Palembang:

- Pra-Kemerdekaan, Sebelum kemerdekaan Indonesia, Palembang telah menjadi salah satu kota penting di Sumatera Selatan dengan sejarah yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kota dilakukan sesuai dengan kepentingan kolonial.
- Era Kemerdekaan, Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Palembang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awalnya, dinas-dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota di Palembang didirikan untuk mengurus pembangunan dan pengembangan kota yang semakin berkembang.
- Pembangunan Modern, Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, Palembang mengalami pertumbuhan yang pesat pada abad ke-20. Ini memerlukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, termasuk jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang bertanggung jawab untuk mengelola ini.
- Perkembangan Terkini: Seiring dengan berjalannya waktu, dinas ini terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam hal kapasitas dan kompetensi. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan dan penataan ruang kota yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pedoman perencanaan kota yang lebih modern.

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang mencerminkan evolusi pembangunan dan penataan kota di daerah tersebut sepanjang sejarahnya. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menciptakan kota yang nyaman, berkelanjutan, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

##### 2.1.1. Visi

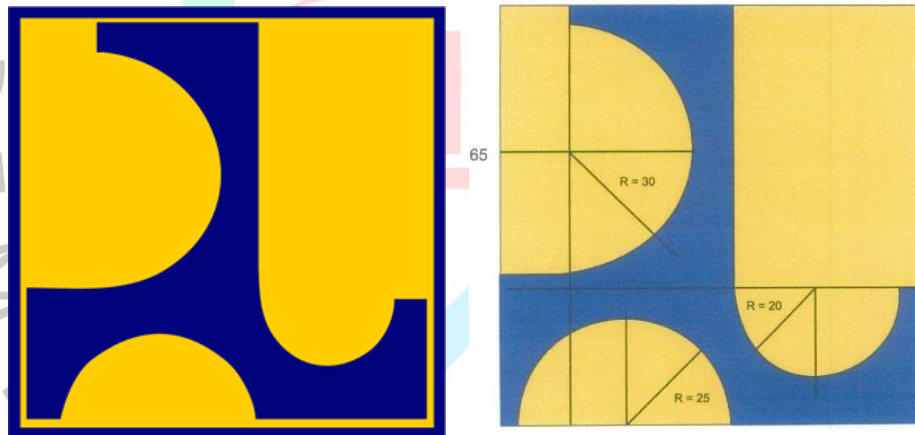
Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

##### 2.1.2. Misi

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, sekretariat serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

### 2.1.2. Logo Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo PUPR

(Sumber : Arsip PUPR Kota Palembang)

- A. Makna Logo
 

Logo secara keseluruhan menggambarkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
- B. Warna
  1. Warna Dasar Lambang adalah Kuning (kuning Kunyit) memiliki makna lambang keagungan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemakmuran, menggambarkan bahwa dalam

mengemban fungsi dan peranan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diabadikan dalam rasa puji syukur terhadap Keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Warna Biru kehitam-hitaman mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan Ketegasan bertindak.

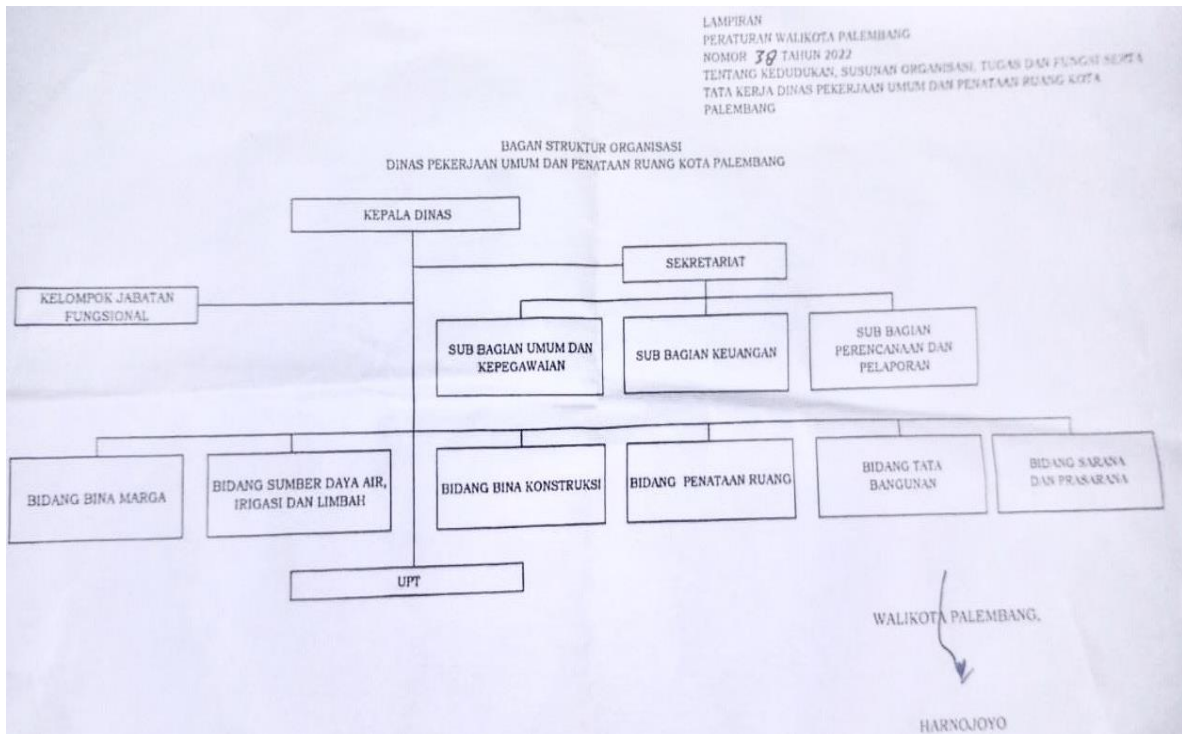
C. Arti Simbolis

1. Baling-baling menggambarkan Dinamika. Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan Stabilitas. Secara keseluruhan menggambarkan Dinamika yang stabil dan Stabil yang dinamis.
2. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke atas melambangkan Penciptaan Perumahan dan Permukiman.
3. Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia.
4. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri dengan bagian lengkungnya telungkup menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan perusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan garis horizontal memiliki arti bentang jalan jembatan di atas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
5. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan dengan bagian lengkungnya yang terlentang menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan garis horizontal menggambarkan penampang dari saluran air
6. Baling-baling dengan 3 daun menggambarkan 3 unsur kekaryaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: Tirta, Wisma (Cipta), dan Marga. Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat.

## 2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu tingkatan yang disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan peran anggota organisasi sesuai dengan jabatannya. Pembentukan Struktur organisasi bertujuan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengelola sumber daya, tugas, tanggung jawab, dan otoritas dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut Robbins & Judge (2014:231) Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Selanjutnya menurut Robbins dan Coulter (2016:322) Struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. Struktur organisasi juga mencakup berbagai unit dan bagian yang berperan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun bagan dari struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Palembang**

**(Sumber : Arsip PUPR Kota Palembang)**

Adapun penjelasan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, yaitu :

1. Kepala Dinas merupakan pejabat tertinggi dalam dinas, bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dan pelaksanaan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan komponen dalam struktur organisasi yang memiliki fungsi mengelompokkan staf berdasarkan tugas dan tanggung jawab fungsional yang serupa atau terkait. Kelompok jabatan fungsional dapat mencakup staf yang memiliki peran dan tanggung jawab serupa atau terkait dalam dinas tersebut.
3. Sekretariat merupakan suatu unit yang menyediakan dukungan administratif untuk Kepala Dinas dan membantu dalam administrasi umum, termasuk pengelolaan jadwal, surat-menyurat, dan administrasi internal.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola aspek-aspek administrasi umum dan

sumber daya manusia (SDM). Unit ini berperan penting dalam mendukung operasional Dinas PUPR dan memastikan berbagai aktivitas administratif dan kepegawaian berjalan dengan lancar. Adapun beberapa fungsi dan tanggung jawabnya seperti melakukan rekrutmen, seleksi, promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Unit ini juga terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan bagi staf. Selain itu unit ini juga melakukan pemantauan absensi staf, manajemen cuti, izin, serta memberikan pelayanan terkait administrasi personal, seperti pembuatan kartu identitas pegawai, surat referensi, dan lainnya.

5. Sub Bagian Keuangan merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola aspek keuangan dan anggaran dinas. Unit ini sangat penting dalam menjaga keuangan yang efisien dan transparan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan penataan ruang.
6. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan proyek-proyek, strategi pembangunan, serta menghasilkan laporan dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan dan pencapaian dinas.
7. Bidang Bina Marga merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, terutama jalan dan jembatan.
8. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi, dan Limbah merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, sistem irigasi, dan pengelolaan limbah di wilayah kota Palembang.
9. Bidang Bina Konstruksi merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan berbagai proyek fisik, seperti gedung-gedung, infrastruktur, dan fasilitas umum.
10. Bidang Penataan Ruang merupakan unit yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan tata ruang dan perkotaan di wilayah kota Palembang. Adapun fungsi dan tanggung jawab dari unit ini seperti Perencanaan Tata Ruang, Pengendalian Pembangunan, Perizinan Bangunan, Pengawasan Tata Ruang, Perencanaan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan, Penyusunan Rencana Zonasi, Penyusunan Peraturan Daerah.
11. Bidang Tata Bangunan merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan tata bangunan, terutama dalam konteks perizinan dan pengawasan pembangunan fisik di wilayah kota Palembang.
12. Bidang Sarana dan Prasarana merupakan suatu unit yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik di wilayah kota Palembang. Adapun fungsi dan tanggung jawab dari unit ini seperti Manajemen dan Perencanaan Infrastruktur, Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Publik, Pengelolaan Transportasi Umum,

Manajemen Drainase dan Pengendalian Banjir, Perencanaan Pembangunan Kota, Konservasi Lingkungan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Perizinan dan Izin Penggunaan Lahan.

13. UPT atau Unit Pelaksana Teknis merupakan suatu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, Unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan teknis yang lebih spesifik dalam ruang lingkup dinas. UPT ini dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memastikan penyelenggaraan layanan dan proyek-proyek infrastruktur yang efisien, berkualitas, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.3 Kegiatan Umum Sub Bagian Keuangan**

Kegiatan umum di sub bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab terkait dengan manajemen keuangan yang berkaitan dengan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah kota Palembang. Beberapa kegiatan umum yang dilakukan oleh sub bagian keuangan Dinas PUPR Kota Palembang, yaitu :

1. **Penyusunan Anggaran**  
Membantu dalam penyusunan anggaran tahunan yang akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan penataan ruang di kota Palembang. Ini mencakup mengidentifikasi sumber pendanaan dan alokasi anggaran untuk setiap proyek.
2. **Pengelolaan Dana**  
Memastikan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek PUPR digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. Ini mencakup pemantauan dan pelaporan penggunaan dana serta pengelolaan kas dan rekening bank.
3. **Pelaporan Keuangan**  
Menyusun laporan keuangan berkala yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini diperlukan untuk memantau kinerja keuangan dan memberikan transparansi terhadap penggunaan dana publik.
4. **Audit Keuangan**  
Berpatisipasi dalam proses audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan aturan dan regulasi keuangan yang berlaku. Audit ini membantu memeriksa keuangan dan memastikan integritas pengelolaan dana.
5. **Perencanaan Keuangan**  
Membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang untuk proyek-proyek PUPR yang akan datang, termasuk pemilihan sumber pendanaan, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan.
6. **Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak**



Dalam hal ini mencakup pembuatan dokumen tender, pemilihan vendor atau kontraktor, dan pengelolaan kontrak selama pelaksanaan proyek.

7. Koordinasi dengan Instansi terkait

Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan instansi lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

8. Pelatihan dan Pengembangan

Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada staf yang terlibat dalam sub bagian keuangan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan publik, peraturan, dan prosedur yang berlaku.

9. Monitoring Kinerja Proyek

Memantau kemajuan proyek-proyek infrastruktur dan penataan ruang yang sedang berlangsung. Ini termasuk memastikan proyek-proyek tersebut sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi Kebijakan Keuangan

Melakukan evaluasi dan analisis kebijakan keuangan yang ada untuk memastikan keefektifan dan efisiensi penggunaan dana publik.

11. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan yang harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. Laporan ini mencakup penggunaan anggaran dan hasil akhir keuangan daerah.

Sub bagian keuangan Dinas PUPR Kota Palembang juga berperan dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara efisien dan transparan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah tersebut. Upaya mereka membantu memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kota Palembang.